

DISERTASI
Relasi Aktor dalam Politik Pembangunan Kota:
Studi Kasus Kebijakan Program Reklamasi Pantai
di Kota Makassar

*Actor Relations in Urban Development Politics:
Case Study of Coastal Reclamation Program Policy in Makassar City*

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor**



Diajukan Oleh

SAKINAH NADIR
14/375497/SSP/313

Program Doktor Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
2021

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAC.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR ISTILAH.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengantar	1
1.2 Latar Belakang.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	12
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Literatur Tentang Politik Pembangunan.....	14
1.5.1 Dimensi Normatif dan Politik Dalam Kebijakan Tata Ruang	14
1.5.2 Memahami Reklamasi Pantai	20
1.5.3 Interaksi antar Aktor dalam kebijakan Publik	22
1.6 Kerangka Teoritik: Koalisi Aktor dalam perspektif <i>New-Institutionalism</i>	31
1.7 Metode Penelitian dan Desain Penelitian	37
1.7.1 Jenis Penelitian	37
1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
1.7.3 Metode Pengumpulan Data.....	40
1.7.4 Analisis dan Penyajian Data	44
1.7.5 Sistematika Disertasi	45
BAB II Dinamika Menuju Terbentuknya Reklamasi Pantai Sebagai Kebijakan Pembangunan Kota.....	48
2.1 Reklamasi Pantai Sebagai Kebijakan Pembangunan di Indonesia	48

2.2 Program Reklamasi Pantai sebagai Kebijakan Pembangunan Kota di Makassar	58
2.3 Jejak Historis Reklamasi Pantai di Makassar	68
BAB III Aktor dan Kepentingannya dalam Program Reklamasi Pantai Sebagai Kebijakan Pembangunan Kota di Makassar	75
3.1 Identifikasi Aktor Kebijakan Program Reklamasi Pantai	76
3.1.1 Aktor Negara	79
3.1.2 Aktor Swasta.....	84
3.1.3 Aktor Civil Society	89
3.2 Koalisi Advokasi pada Pilihan Program Reklamasi Pantai.....	93
3.2.1 <i>Belief System</i> Aktor Negara	95
3.2.2 <i>Belief System</i> Aktor Swasta	104
3.2.3 <i>Belief System Civil Society</i>	109
BAB IV Interaksi Antar Aktor dan Strategi Koalisi Aktor dalam Program Reklamasi Pantai Sebagai Upaya Mensejahterakan Rakyat.....	133
4.1 Interaksi Antar Aktor Kebijakan	133
4.1.1 Interaksi Antara Aktor Negara.....	135
A. Interaksi Antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota	136
B. Interaksi Antara Pemerintah Daerah dan DPRD.....	142
C. Interaksi Antara Instansi Pemerintah	150
4.1.2 Interaksi Antar Aktor Negara dengan Aktor Swasta	154
4.1.3 Interaksi Antar Aktor Negara dengan Aktor <i>Civil Society</i>	165
4.1.4 Interaksi Antara Aktor Swasta dengan <i>Civil Society</i>	169
4.2 Strategi Koalisi Aktor dalam Menyikapi Program Reklamasi Pantai	179
4.2.1 Koalisi Advokasi Pro Reklamasi Pantai	180
4.2.2 Koalisi Advokasi Kontra Reklamasi Pantai	188
BAB V Dinamika Interaksi antar Aktor diantara Perbedaan Kepentingan dan Keinginan Mewujudkan Pembangunan dan Kesejahteraan di Kota Makassar.....	193
5.1 Dilema Pemerintah diantara Posisi sebagai Penyedia Kesejahteraan Masyarakat dan Kepentingan Bisnis Swasta terkait Reklamasi Pantai.....	194
5.2 Kerangka Logika <i>Civil Society</i> dan Aktor Negara	217
5.3 Peta Konflik Pada Internal Koalisi Advokasi.....	219
5.4 Relasi Aktor dan terbentuknya <i>Shadow State</i> dalam Kebijakan Program Reklamasi Pantai	228

5.5 Posisi Aspek Kultural dalam <i>Interrelasi</i> Aktor Kebijakan Program Reklamasi Pantai	238
BAB VI PENUTUP	249
6.1 Kesimpulan	250
6.2 Implikasi Teoritis.....	255
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang politik pembangunan kota terkait dengan adanya kebijakan pembanguana yang melibatkan beragam aktor dan kepentingan didalamnya. Dengan mengambil kasus kebijakan program reklamasi pantai di kota Makassar. Persoalan kunci yang dieksplorasi dalam penelitian ini terkait dengan bagaimana pengaruh aktor-aktor dominan terutama aktor negara dan aktor swasta dalam kebijakan pembangunan. Fokus penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis jejaring dan relasi informal maupun personal yang mempengaruhi arah dan implementasi kebijakan pembangunan kota.

Untuk menjelaskan dan memberi makna terhadap temuan-temuan penelitian, studi ini menggunakan kerangka pendekatan *new institutionalism* yang dikembangkan oleh Grubovic dan teori *Advocacy Coalition Framework*. Sementara itu *spatial planning* dipergunakan sebagai konsep pendukung. Cara kerja dalam penelitian ini mengikuti tata aturan penelitian kualitatif (*qualitative research*) dengan menggunakan studi kasus sebagai jenis penelitian. Pilihan program reklamasi sebagai kebijakan pembangunan kota di Makassar sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena tersebut.

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aktor swasta memberi pengaruh besar dan menjadi aktor dominan dalam kebijakan reklamasi pantai di Makassar yang seharusnya menjadi otoritas aktor negara. Untuk mendapatkan posisi tersebut aktor swasta membangun relasi-relasi informal dengan aktor pemerintah terutama individu-individu dari aktor pemerintah yang memiliki otoritas dan kekuasaan besar dalam menentukan keberlangsungan kebijakan reklamasi. Melalui relasi-relasi informal, aktor swasta berupaya memanfaatkan nilai-nilai kultural yang ada dalam konteks masyarakat Bugis-Makassar yang masih kental mempengaruhi sistem pemerintahan di Makassar. Nilai budaya Bugis-Makassar yang senantiasa berupaya menjunjung tinggi dan menghormati pentingnya relasi kekeluargaan dan komunitas menjadi pintu masuk bagi aktor swasta untuk mengikat komitmen aktor pemerintah. Komitmen yang terbangun antara dua aktor tersebut, bagi pihak swasta untuk memastikan posisi dan keberlanjutan investasinya, sedangkan bagi aktor pemerintah dalam hal ini tokoh penting dalam kebijakan memastikan jaminan keberlangsungan kepentingan mereka dalam menjaga relasi-relasi sosial dan membagi sumberdaya kepada anggota keluarga atau orang-orang terdekatnya. Relasi yang terbangun dari kedua aktor tersebut mampu menjadi kekuatan *shadow state* yang tidak terlalu nampak di permukaan tetapi memberi pengaruh besar terhadap kebijakan reklamasi di Makassar melalui otoritas negara

Kata Kunci : Relasi Aktor, *Advocacy Coalition Framework*, *Spatial Planning*, Reklamasi.

DAFTAR REFERENSI

BUKU DAN JURNAL

- Acciaioli G. 2000. Kinship and Debt; The Social Organization of Bugis Migration and Fish Marketing at Lake Lindu, Central Sulawesi In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, *Authority and Enterprise Among The Peoples of South Sulawesi* 156, No: 3, Leiden. hal. 588-617
- Ackrill, R., & Kay, A. (2006). Historical-Institutionalist perspectives on the Development of the EU Budget System. *Journal of European Public Policy*, 13(1), 113–133.
- Agustino, Leo(2009), *Pilkada dan dinamika Politik Lokal*.Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Agyepong, Irene Akua and Sam Adjei 2008. Public Social Policy Development and Implementation: A Case Study of the Ghana National Health Insurance Scheme. *Health Policy and Planning*, Volume 23, Issue 2, March, pp. 150–160.
- Alexander, J., Nank, R., & Stivers, C. (1999). Implications of Welfare Reform: Do Nonprofit Survival Strategies Threatencivil Society. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* no. 28.
- Anderson, J.E. 2003. *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton. Mifflin Company.
- Alvesson, M. and Skoldberg, K., 2000, *Reflexive Methodology New Vista for Qualitative Research*, London: SAGE Publications.
- Aspan, Zulkifli. 2017. Tinjauan Yuridis Izin Reklamas Pantai MAKassar dalam Mega proyek Centre Point of Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan* Volume 1, Nomor 2, April: 172-189.
- Assink, Matthijs and Nico Groenendijk, 2009. Spatial, Quality, Location Theory and Spatial Planning. (paper) presented at Regional Studies Association Annual Conference 2009 Understanding and Shaping Regions: Spatial, Social and Economic Futures Leuven, Belgium, April 6-8.
- Atkinson, R. (1999). Discourses of Partnership and Empowerment In Contemporary British Urban Regeneration. *Urban Studies*, 36.
- Blackman, Tim. (1995). *Urban Policy in Practice*. Canada: Routledge.
- Blomkamp, Emma.,s M. Nur Sholikin, Fajri Nursyamsi, Jenny M. Lewis and Tessa Toumbourou 2017 *Understanding Policymaking In Indonesia ; In Search of a Policy Cycle*. Study by The Policy Lab (The University of Melbourne) and the Indonesian Centre for Law and Policy Studies (PSHK).
- Bijlsma, Rianne M., Pieter W. G. Bots, Henk A. Wolters and Arjen Y. Hoekstra 2011. *An Empirical Analysis of Stakeholders' Influence on Policy*

Development: The Role of Uncertainty Handling. *Ecology and Society*, Vol. 16, No. 1. March.

- Berdal, Mats and David M. Malone (eds.) 2000. Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars. Lynne Rienner Publishers, Inc, the United States of America.
- Beland, D. (2005). Ideas and Social Policy: An Institutionalist Perspective. *Social Policy and Administration*, 39(1), 1–18.
- Bloemraad, I. (2005). The limits of de Tocqueville: How Government Facilitates Organizational Capacity in New Communities. *Journal of Ethnic and Migration Studies*.
- Bernstein, Steven and Benjamin Cashore 2012. Complex global governance and domestic policies: four pathways of influence. *International Affairs* 88: 3:
- Breslin, Shaun and Helen E. S. Nesadurai 2018. Who Governs and How? Non-State Actors and Transnational Governance in Southeast Asia. *Journal of Contemporary Asia* Volume 48, Issue 2:
- Caporaso, James A. dan David P. Levine, (2008). Teori-Teori Ekonomi Politik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Chavez, Holcer, Denis Nadolnyak, and Miguel Saraviac. 2013. Socioeconomic and Environmental Impact of Development Interventions: Rice Production at the Gallito Ciego Reservoir in Peru. *International Food and Agribusiness Management Review* Volume 16, Issue 1: pp. 1-15.
- Cresswell W. John, 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih di Antara Lima Pendekatan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Davies S. Jonathan, 2002. Urban Regime Theory a Normative Empirical Critique. *Journal of Urban Affairs*. Volume 24, Number 1,
- Denzin K. Norman and Yvonna S. Lincoln. 1997, Handbook of Qualitative Research, Sage Publication.
- Department of Economic and Social Affairs, 2013. World Economic and Social Survey, Sustainable Development Challenges. United Nation.
- Department of Spatial Planning, 2007. Spatial Planning in Denmark. The Danish Ministry of Environment.
- Diamond Larry (2003). *Developing Democracy, Toward Consolidation*. Yogyakarta : IRE Press. Hal 298-309
- Djunaedi, Achmad, 2012. Proses Perencanaan Wilayah dan Kota. Gadjah Mada Press. Yogyakarta.
- Draskovic, M., Milica, D., Mladen, I., & Chigisheva, O, 2017. Preference of institutional changes in social and economic development. *Journal of International Studies*, 10(2), 318-328.
- Dobler, Constanze (2011) : The Impact of Formal and Informal Institutions on Economic Growth: A Case Study on the MENA Region,

- Hohenheimer volkswirtschaftliche Schriften, No. 65, Peter Lang International Academic Publishers, Frankfurt a. M.
- Dobšinská, Z., J. Šálka, Z. Sarvašová, J. Lásková 2013. Rural development policy in the context of actor-centred institutionalism. *Journal of Forest Science*, 59, (1): 34–40
- Dornbusch, Rudiger and Sebastian Edwards (eds.). 1991. *The Macroeconomics of Populism in Latin America*. University of Chicago Press.
- Downes, Bryan T. (1976). *Politics, Change, and The Urban Crisis*. California: Wadworth Publishing company.
- Denzin, Norman K, *Handbook of qualitative research*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Dunn, W.(2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Drs.Samodra Wibawa,MA, Dra .Diah Asitadani,MA, Drs. Agus Heruanto Hadna,MS, Drs Erwan Agus Purwanto,MS Penerjemah). Yogyakarta: Gajah mada University Press
- Evers, Hans Diater (1990), *Kelompok-kelompok Strategis : Studi Perbandingan Tentang Negara, Birokrasi, dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Federal Office for Building and Regional Planning, 2001. *Spatial Development and Spatial Planning in Germany*. Federal Office for Building and Regional Planning. Bonn, Germany.
- Feiock, R. C. (1989). The Adoption of Economic Development Policies by State and Local Governments: A Review. *Economic Development Quarterly*, 3(3), 266–270.
- Fischer., Miller & Sidney. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik : Teori, Politik dan Metode*. Nusa Media. Bandung.
- Galland, Daniel & Stig Enemark, 2013. Impact of Structural Reforms on Planning Systems and Policies: Loss of Spatial Consciousness?. *The European Journal of Spatial Development*.
- Gaffar, Afan, (2006) *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Gerd Gigerenzer (2001) *Decision Making : Nonration Theoris*. Published : *International Encylophedia of the Social and Behavioral Sciences*. Vol.5. Oxford : Elsevies
- Gili Argenti , 2018. Civil Society, Shadow State dan Local Strogmen Dalam Kajian Politik Lokal. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674 Vol.4, No.1, April 2018*
- Grodach, Carl, 2011. Before and After the Creative City: The Politics of Urban Cultural Policy in Austin, Texas. *Journal of Urban Affairs*. Volume 34, Number 1,
- Grubović, Ljiljana V. 2004. New Institutionalism as a New Theoretical Framework for Urban Political Analysis. *Spatium* 2004 Volume , Issue 11.
- Halim, Abdul (2014). *Politik Lokal : Pola, Aktor, dan Alur Dramtikalnya*. LP2B. Yogyakarta.

- Harriss-Whitw, B. *India Working : Essays on Society and Economy*. Cambridge. Cambridge University Press, 2003
- Heilbroner, Robert L. (1982), *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Held, David and Anthony MC (et.all.), 1999. *Global Transformations, Politics, Economics and Culture*. Stanford University Press, California.
- Howlett, Michael & Ramesh,M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Toronto: Oxford University Press.
- Popoola, Olufemi O. 2016. Actors in Decision Making and Policy Process. *Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences*. Vol. 5(1).
- Instituto Superior Técnico, 2012. *exploring The Complexity of Policy design*. BRT - ALC.
- Joumard, Robert and Jean-Pierre Nicolas. 2009. *Transport Project Assesment Methodology Within the Framework of Sustainable Development. Ecological Indicators*, vol 10. No. 2.
- Kamal, Babra 2017. Konflik Kepentingan Perebutan Pesisir Kota Makassar dalam Pembangunan Center Point of Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 3 No. 2; pp. 83-93
- Kantor, Paul, H. V. Savitch, and Serena Vicari Haddock. 1997. The Political Economy of Urban Regimes A Comparative Perspective. *Urban Affairs Review*. Volume: 32 issue: 3,
- Kates, Robert W. at. All, What is Sustanable Development ? Goals, Indicatros, Values, and Practices. *Environment* Vol. 47 Number 3.
- Komisi Dunia untuk lingkungan dan Pembangunan, Hari Depan Kita bersama. 1999. Gramedia. Jakarta.
- Koresawa, A. and Konvitz, J. 2001. "Towards a New Role for Spatial Planning". In: Organisation for Economic Co-operation and Development (2001). *Towards a New Role for Spatial Planning*. OECD, Paris.
- Kraus, Neil. 2004. The Significance of Race in Urban Politics: The Limitations of Regime Theory. *Race and Society* 7.
- Kubler, Daniel. 2001. Understanding Policy Change with The Advocacy Coalition Framework:An Application to Swiss Drug Policy. *Journal of European Public Policy* 8:4 August.
- Lake, Robert W. and Kathe Newman 2002. Differential Citizenship in The Shadow State. *Geo Journal Volume* 58. pp. 109–120.
- Lean M. Hermans and Wilthissen, 2009. Actor Analysis Methods and Their Use for Public Policy Analysis. *Europen Journal of Operational Research*. Juli 2009.
- Lefebvre, Henri. 2003. *The Urban Revolution*, University of Minnesota Press. Minneapolis. London.
- Lindblom, Charles. 1986. *Proses penetapan Kebijakan Publik*. edisi kedua. Jakarta: Airlangga.
- Marshall, C. & Gerstl-Pepin, C. (2005). *Re- Framing Educational Politics for Social Justice*. Boston: Pearson Education, Inc.

- Mark S. Reed (et.al), 2009. Who's and Why : A Typology of Stekholders Analysis Methods For Natural Resouers Management. *Journal of Enviromental Management. Elsevier.*
- Mattulada, 1985, LATOA: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Megan K. Blake, Reconstructing Urban Regime Theory: Regulating Urban Politics in a Global, Book Reviews Book Reviews Book Reviews Thousand Oaks, Calif, Sage, Publications, 1997, Megan K. Blake, Megan K. Blake, *Economic Geography, Vol. 75, No. 4 (Oct., 1999), pp. 419-420*, Clark University
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif. UI Press. Jakarta.
- Ministry of the Environment, Denmark, 2007. Spatial Planning in Denmark.
- Mitchell, Katharyne, 2001. Transnationalism, neo-liberalism, and the rise of the shadow state. *Economy and Society Volume 30 Number 2 May 2001: 165–189.*
- Morris AD, Mueller CM, eds. 1992. Frontiers of Social Movement Theory. New Haven, CT: Yale Univ. Press.
- Mossberger, Karen, and Gerry Stoker. 2001. The Evolution of Urban Regime Theory The Challenge of Conceptualization. *Urban Affairs Review*. July 1.
- Nikki Funke, Hussein Solomon, 2002. The Shadow State in Africa: A Discussion. *DPMF Occasional Paper, No. 5. Addis Ababa, Ethiopia*
- Nordholt & Klinken (2007) "Politik Lokal di Indonesia", Jakarta : YOI.
- Nurzaman, Siti Sutriah, 2012. Perencanaan Wilayah dalam Konteks Indonesia. Penerbit ITB. Bandung.
- Nugroho Iwan, Dahuri Rokhim. 2012. Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. LP3ES. Jakarta.
- Osman, Ferdous Arfina. 2002. Public Policy Making : Theories and Their Implications in Developing Countries. *Journal Asian Affairs. Hal. 38.*
- Ostrom E, 2010. Institutional Analysis and development: Elements of the Framework in Historical Perspective. In: Crothers C (ed) Historical Developments and Theoretical Approaches in Sociology in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed Under the Auspices of the UNESCO. Eolss Publishers, Oxford.
- Parsons, Wayne. 2008. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Kencana, Jakarta.
- Parson, Wayne. (2014). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah). Jakarta: Prenada Media.
- Pham, Thuy T., Monica Di Gregorio, Rachel Carmenta, Maria, Brockhaus and Dung N. Le 2014. The REDD+ Policy Arena in Vietnam: Participation of Policy Actors. *Ecology and Society Vol. 19, No. 2.(22). Jun. pp. 1-11.*

- Pelras, Christian. (2005). 'Budaya Bugis: Sebuah Tradisi Modernitas' dalam Kathryn Robinson dan Mukhlis Paeni. (ed.), *Tapak-Tapak Waktu: Kebudayaan, Sejarah, dan Kehidupan Sosial di Sulawesi Selatan*. Makassar: Innawa, 37-51.
- Pelras, C. 2000. Patron-Client ties Among the Bugis and Makassarese of South Sulawesi In: *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Authority and Enterprise Among the Peoples of South Sulawesi 156, No: 3, Leiden, hal. 393-432*
- Peters, B. Guy 2010: Governing in the Shadows, SFB-Governance Lecture Series, No. 3, March.DFG Research Center (SFB) 700, Berlin.
- Pouyé, Raphaël 2005. 'Shadow States'? State Building and National Invention Under External Constraint in Kosovo and East Timor (1974-2002). *Questions de recherche / Research in question*, No. 13, February.
- POPOOLA, Olufemi O. 2016. Actors in Decision Making and Policy Process. *Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences. Vol. 5(1)*
- Rachbini, Didik J. 2004, *Ekonomi Politik Kebijakan dan Strategi Pembangunan*. Granit, Jakarta.
- Reno, William. 1995. *Corruption and State Politics in Sierra Leone*. African Studies Series No. 83. Cambridge University Press
- Rotmans, Jan et.al. 2000. An Integrated Planning Tool for Sustainable Cities. *Environmental Impact Assessment review 20*
- Royal Town Planning Institute. 2014. Thinking Spatially Why places need to be at the heart of policy-making in the twenty-first century. *Planning Horizons no.1.Thinking Spatially*. June.
- Sabatier, P.A. dan Jenkins-Smith H. (Eds.).1993. *Policy Change and Learning : and Advocacy Coalition Approach*. Boulder, CO : Westview Press.
- 1999. "The Advocacy Coalition Framework: An Assessment." In *Theories of the Policy Process*, Edited by Paul A. Sabatier,. Boulder, CO: Westview Press.
- Sabatier (1998) The Advocacy Coalition Framework: Revisions and Relevance for Europe. *Journal of European Public Policy*,
- Shearer, J. C., Abelson, J., Kouyaté, B., Lavis, J. N., & Walt, G. (2016). Why do policies change? Institutions, interests, ideas and networks in three cases of policy reform. *Health Policy and Planning, 31(9), 1200–1211*.
- Wahab, Solichin (2001). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Stone, C. N. (1993). Urban Regimes and the Capacity to Govern: A Political Economy Approach. *Journal of Urban Affairs, 15*,
- Sudaryono, 2006. Paradigma Lokalisme dalam Perencanaan Spasial. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 17/No. 1*,
- Tantivess, Sripen and Gill Walt 2008. The Role of State and non-State Actors in the Policy Process: The Contribution of Policy Networks to the Scale-up of Antiretroviral therapy in Thailand. *Health Policy and Planning, Volume 23, Issue 5, September, pp. 328–338*.

- Thomas, A. (2004) *The Study of Development*. Paper prepared for DSA Annual Conference, 6 November, Church House, London.
- Todaro, Michael P. 1998, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta.
- United Nation, 2008. *Spatial Planning: Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Reference to Countries in Transition*. United Nation.
- Van Wyk J. 2007. The Impact of Development on the Environment as Part and Parcel of Integrated Development Planning?. *Law, Democracy and Development 11*: pp. 57–79.
- Wahab, A.S. (1998. *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi UNIBRAW.
- Warjio. 2016. *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*.
- Wegener, Michael. 2001. New Spatial Planning Models. *Published in International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 3*
- Wolch, J. (1990). *The Shadow State: Government and the Voluntary Sector in Transition*. New York, NY: The Foundation Centre.
- Yorke V. (2016) Jordan's Shadow State and Water Management: Prospects for Water Security Will Depend on Politics and Regional Cooperation. In: Hüttel R., Bens O., Bismuth C., Hoechstetter S. (eds) *Society - Water - Technology. Water Resources Development and Management*. Springer, Cham.
- Zuindeau, Bertrand. 2006 Spatial Approach to Sustainable Development: Challenges of Equity and Efficacy. *Journal of Regional Studies, Vol. 40.5, July*.
- Zulkifli, Aspan, 2017, Tinjauan Yuridis Izin Reklamasi Pantai Makassar Dalam Mega Proyek Centre Point of Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan* P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X Volume 1, Nomor 2, April 2017

KARYA ILMIAH DAN LAPORAN PENELITIAN

- Ambari, M. 2017. Kontroversi di Balik Reklamasi Pantai Makassar, Antara Kepentingan Rakyat dan Pengembang. Mongabay Situs Berita Lingkungan. <https://www.mongabay.co.id/2017/07/13/reklamasi-makassar-untuk-rakyat-atau-pengembang/>. Diakses 30 Mei 2019.
- Babra Kamal (2017). Konflik Kepentingan dalam Perebutan Pesisir Kota Makassar (Studi Tentang Pembangunan *Center Poin of Indonesia*).
- Bwalya, Samuel M., Ezekiel Phiri, and Kelvin Mpembamoto 2009. How non-state actors lobby to influence budget outcomes in Zambia. Discussion Paper Series Number twenty-seven, September. IPPG discussion papers .
- Fische, Manuel. 2013. Policy Network Structures, Institutional Context, and

Policy Change. (un-published paper)
KOPEL Sulawesi Selatan . Resume Kasus dugaan Penyimpanan Atas
Pelaksanaan Reklamasi Proyek Kawasan CPI (*Centre Point of
Indonesia*) Prov Sulsel 2008-2015.
WALHI Sulawesi Selatan (2016). Laporan Kasus Reklamasi *Centre Point of
Indonesia* (CPI) di Pesisir Kota Makassar.
WALHI Sulawesi Selatan (2017). Laporan Kasus Reklamasi *Centre Point of
Indonesia* (CPI) Kota Makassar
WALHI Sulawesi Selatan 2019. Catatan Akhir Tahun Walhi Sulsel 2019.
Degradasi Lingkungan dan Bencana Ekologis di Sulawesi Selatan.
Walhi Sulsel.

Karya Lain dan Karya Non Cetak

Internet<http://nasional.kompas.com/read/2016/04/01/18245351/KPK.Suap.untu>
k.Sanusi.Terkait.Raperda.Reklamasi.
<http://nasional.kompas.com/read/2016/04/01/21160331/KPK.Sebut.Suap.Angg>
otaDPRD.DKI.Sebagai.Grand.Corruption.
<http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html>
<http://sulsel.pojoksatu.id/read/2015/11/14/walhi-tuding-pemkot-makassar>
abaikan-izin-reklamasi-pantai/
[http://www.antarasulsel.com/berita/61966/pansus-rtrw-makassar-ancam-](http://www.antarasulsel.com/berita/61966/pansus-rtrw-makassar-ancam-tidak-memasukan-reklamasi)
[tidak-memasukan-reklamasi](http://makassar.antaraneews.com/berita/67365/dprd-makassar-sahkan-perda-rtrw)
[http://makassar.antaraneews.com/berita/67365/dprd-makassar-sahkan-perda-](http://makassar.antaraneews.com/berita/67365/dprd-makassar-sahkan-perda-rtrw)
[rtrw](http://regional.kompas.com/read/2016/04/13/13534591/Gubernur.Sulsel.Digug)
<http://regional.kompas.com/read/2016/04/13/13534591/Gubernur.Sulsel.Digug>
[at.ke.PTUN.Terkait.Reklamasi.Pantai.Losari](http://regional.kompas.com/read/2016/04/14/12535401/Kisah.Daeng.Bollo.Kor)
<http://regional.kompas.com/read/2016/04/14/12535401/Kisah.Daeng.Bollo.Kor>
[ban.Reklamasi.Pantai.Losari.yang.Kini.Hidup.Telantar](http://celebesonline.com/2017/03/31/warga-pesisir-pantai-makassar-dan-walhi-)
[demo-reklamasi-cpi/http://makassar.tribunnews.com/2016/04/25/rapat-](http://celebesonline.com/2017/03/31/warga-pesisir-pantai-makassar-dan-walhi-)
[pansus-cpi-dihentikan-sementara-waktu](http://makassar.tribunnews.com/2016/04/25/rapat-pansus-cpi-dihentikan-sementara-waktu)
Kompas.com 28 Maret 2016.
Antaraneews.com, diakses 24 September 2017.
Republika.co.id. diakses 24 September 2017.
Makassar.tribunnews.com2016
Kabarmakassar.com2017

PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMEN PEMERINAH

Peraturan Pemerintah Kota Makassar No. 06 Tahun 2006 tentang RTRW Kota
Makassar 2006-2015.
Peraturan Pemerintah Kota Makassar No. 04 Tahun 2015 tentang RTRW Kota
Makassar 20015-2030.
Keputusan Walikota Makassar Nomor : 640/175/Kep/II/09
Pedoman Perencanaan tata Ruang Kawasan reklamasi Pantai Direktorat
Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum

Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Undan-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang No. 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Perpres No. 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 17 tahun 2013 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Surat Izin Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 644/6273/TARKIM tertanggal 1 November 2013 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan Strategi Provinsi.